



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmatNya, kami masih diberikan kemampuan untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Ranwal Renja Tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arahan/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2025 nanti.

Dalam Urusan Penanaman Modal, Rancangan Renja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rancangan Akhir Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta perannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kuala Tungkal, 16 Juli 2024

Tim Penyusun Renja DPMPTSP
Penanggung Jawab



M. HAVIZ, S.E.

Pembina /IVa

NIP. 19740613 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	30
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	30
3.3 Program dan Kegiatan	31
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	42
Bab V Penutup.....	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran	43
Lampiran Berita Acara Forum Perangkat Daerah	44

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan RKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ranhir Renja SKPD) untuk perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dokumen perencanaan untuk perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rancangan Renja mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Rencana Kerja ini disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
16. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6); dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, Rencana Target kegiatan Tahun berjalan (2024), Rancangan Rencana kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan maju Tahun Anggaran 2026.

2. Tujuan

- Sebagai dasar penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sitematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023

- 2.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023
- 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan III
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab II

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan memenuhi target dari yang telah direncanakan didalam rencana Strategis 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari 6 (enam) Program yang dilaksanakan pada Tahun 2023, hanya 1 (satu) Program yang tidak mencapai 100%, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan realisasi sebesar 99,9%. Hal ini terjadi karena terdapat sub kegiatan yang tidak mencapai target yaitu subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Target dari Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun 2023 adalah 450 Laporan dengan realisasi 439 Laporan. Adapun rincian dapat dilihat padatable berikut :

No	Bulan	Laporan Perjalanan Dinas Biasa	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Kota
1	Januari		
2	Februari	20	5
3	Maret	14	2
4	April	38	42
5	Mei	17	6
6	Juni	23	32
7	Juli	22	17
8	Agustus		33
9	September		
10	Oktober	1	6
11	November	82	63
12	Desember	15	1
	Jumlah	232	207
	Total		439

Untuk realisasi Program – Program Strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun 2023 sebagai berikut:

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada tahun 2023 Program ini melaksanakan penyusunan Dokumen Naskah akademik Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Ditahun 2024 dilanjutkan kembali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang penanaman modal.

Program Promosi Penanaman Modal

Melalui Program ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengikuti Pameran APKASI Otonomi Ekspo ke-18 yang berlangsung pada 20 s.d. 23 Juli 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang. Pada tahun 2023 hanya dilakukan 1 (satu) kali kegiatan pameran oleh APKASI.

Program Pelayanan Penanaman Modal

Selama Tahun 2023, melalui program ini telah terbit sebanyak 5.445 Perizinan dan Nonperizinan yang terdiri dari 622 dari Aplikasi SiCantik, 4,229 dari Aplikasi OSS dan 594 dari Aplikasi PBG.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar 429,6 Milyar Rupiah dari target renja sebesar 301 Milyar Rupiah sehingga persentase capaian program ini mencapai 143%. Untuk gambaran umum realisasi investasi tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambaran Umum Realisasi Investasi Tahun 2023

No	Uraian	Nilai	Satuan
1	Realisasi Investasi	Rp 429.621.309.553,00	
	Dengan Rincian		
	Triwulan I	Rp 178.968.203.609,00	
	Triwulan II	Rp 104.325.258.806,00	
	Triwulan III	Rp 61.206.089.151,00	
	Triwulan IV	Rp 85.121.757.987,00	
2	Penyerapan Tenaga Kerja	526	Orang
	Dengan Rincian		
	TKI	524	Orang
	TKA	2	Orang

No	Uraian	Nilai	Satuan
3	Jumlah LKPM yang diterima	302	Dokumen
	Dengan Rincian		
	Triwulan I	70	Dokumen
	Triwulan II	67	Dokumen
	Triwulan III	99	Dokumen
	Triwulan IV	66	Dokumen
4	Pencapaian Target	Target	% Capaian
	RPJMD	Rp 301.000.000.000,00	142,73%
	DPMPTSP PROV/ BPKM	Rp 1.179.924.510.000,00	36,41%
5	5 (lima) Perusahaan Penyumbang Investasi Terbesar		
	PMDN		
	PT. Inti Indosawit Subur	Rp 102.771.651.049,00	
	PT. Anekapura Multikerta	Rp 37.366.600.000,00	
	PT. Wirakarya Sakti	Rp 33.401.408.724,00	
	PT. Sinar Berlian Nusantara	Rp 22.400.000.000,00	
	PT. Wirakarya Sakti	Rp 21.812.600.603,00	
	PMA		
	PT. Mitra Sawit Jambi	Rp 5.623.927.390,00	
	PT. Aroma Jaya Indonesia	Rp 4.000.000.000,00	
	PT. Energasindoi Heksa Karya	Rp 3.483.912.000,00	
	PT. Tanjung Jabung Power	Rp 3.006.961.650,00	
	PT. Fortius Wajo Perkebunan	Rp 2.770.188.428,00	
6	5 (lima) Lokasi Usaha dengan Realisasi Investasi Terbesar		
	Merlung	Rp 129.875.251.982,00	
	Tebing Tinggi	Rp 118.457.954.581,00	
	Batang Asam	Rp 98.642.883.583,00	
	Tungkal Ilir	Rp 27.916.132.236,00	
	Muara Papalik	Rp 21.014.528.800,00	
7	Sektor Usaha dengan Realisasi Terbesar		
	Sekunder	Rp 177.939.119.154,00	
	Primer	Rp 146.945.329.328,00	
	Tersier	Rp 104.736.861.071,00	
8	Asal Negara Perusahaan PMA dengan Investasi Terbesar		
	Malaysia	\$ 869.062,86	
	India	\$ 310.132,97	

No	Uraian	Nilai	Satuan
	R.R. Tiongkok	\$ 270.270,27	
	Jepang	\$ 252.899,32	
	Singapura	\$ 242.690,90	

Selain melakukan pengawasan terhadap realisasi investasi, Program ini juga mengadakan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha. Pada tahun 2023 sudah dilaksanakan Bimbingan teknis sebanyak 7 Kali dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 280 Orang.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini selama tahun 2023 memfasilitasi Program Pelayanan Penanaman Modal dengan menyediakan aplikasi perizinan yaitu OSS dan SiCantik.

Untuk detail kesampaian capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada table T-C 29.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100 %	35 %	100 %	99,93% %	99,932%	100 %	100 %	
		Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
2.18.01.2.01	perencanaan, Pengaanggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	60 Dokumen	20 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	40 Dokumen	66,67
2.18.01.2.01.6	penyusunan dokumen perencanaan dan perangkat daerah	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	60 Dokumen	20 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	40 Dokumen	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	48 Bulan	66,67
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	159 Bulan	46 Bulan	23 Orang / Bulan	23 Orang / Bulan	100%	30 Orang / Bulan	99 Bulan	62,26
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	72 Bulan	24 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	48 Bulan	66,67
2.18.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	426 Stell	82 Stell	131 Stell	131 Stell	100%	Stell	Stell	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	426 Stell	82 Stell	131 Stell	131 Stell	100%	79 Stell	292 Stell	68,54
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	60 Bulan	12 Bulan	100 %	99,59% %	99,59%	%	%	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	85 Paket	20 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	50 Paket	58,82

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	260 Paket	90 Paket	50 Paket	50 Paket	100%	50 Paket	190 Paket	73,08
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	1200 Bulan	400 Bulan	100 Paket	100 Paket	100%	100 Paket	600 Paket	50,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	6000 Paket	2000 Paket	1000 Paket	1000 Paket	100%	1000 Paket	4000 Bulan	66,67
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	120 Dokumen	48 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	24 Dokumen	96 Bulan	80,00
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Rapat/ Konsultasi	6000 Laporan	2000 Laporan	450 Laporan	439 Laporan	98%	1000 Bulan	3439 Bulan	57,32
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	144 Laporan	48 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	96 Bulan	66,67
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	66,67
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100,00
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100,00
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajaknya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100,00
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69 Unit	12 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	50 Unit	75 Unit	108,70
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60 Bulan	12 Bulan	2 Unit	2 Unit	100%	1 Bulan	15 Bulan	25,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Produk Hukum	300,00
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peta Potensi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Revisi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	11 Calon Investor	1 Calon Investor	2 Calon Investor	3 Calon Investor	150%	2 Calon Investor	6 Calon Investor	54,55
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah	11 Calon Investor	1 Calon Investor	2 Calon Investor	3 Calon Investor	150%	2 Calon Investor	6 Calon Investor	54,55
2.18.03.2.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data/ Informasi Strategi Promosi Penanaman Modal	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	1 Dokumen	4 Dokumen	66,67
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	12000 Izin	2000 Izin	2000 Izin	5445 Izin	272%	2000 Izin	9445 Izin	78,71
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan	Tercapainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	12000 Izin	2000 Izin	2000 Izin	5445 Izin	272%	2000 Izin	9445 Izin	78,71

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah Kabupaten / Kota									
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Berbasis Elektronik	12000 Izin	3468 Izin	1500 Izin	4851 Izin	323%	1500 Izin	9819 Izin	81,83
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitemen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Tercapainya Percepatan Penyelenggraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	4500 Pelaku Usaha	709 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	594 Pelaku Usaha	149%	500 Izin	1803 Izin	40,07
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Palayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	34 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	83%	6 Laporan	21 Laporan	61,76
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	67%	3 Dokumen	8 Dokumen	266,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah								
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	2014 M	2108 M	301 M	429,6 M	143%	370 M	2907,6 M	144,37
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	2014 M	2108 M	301 M	429,6 M	143%	370 M	2907,6 M	144,37
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Data dan Informasi Perkembangan Realisasi Penanaman Modal	1 Laporan	1 Laporan	6 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	100%	6 Kegiatan Usaha	13 Laporan	1300,00
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Sosialisasi Aturan dan ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Kali	2 Kali	80 Pelaku Usaha	280 Pelaku Usaha	350%	80 Pelaku Usaha	362 Kali	18100,00
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman	12 BAP	12 BAP	12 Kegiatan Usaha	17 Kegiatan Usaha	142%	12 Kegiatan Usaha	41 BAP	341,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Modal sesuai ketentuan								
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%	1 Sistem Informasi	Sistem Informasi	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%	1 Sistem Informasi	Sistem Informasi	
2.18.06.2.01.01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi secara elektronik yang dilaksanakan	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%	1 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	100,00

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Penyusunan Penetapan Kinerja 2023 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2022, IKU, dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Tujuan	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Target 2023	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Pemerintahan melalui apartur pemerintah daerah yang berkualitas (Misi.IV)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	Data Perizinan dan Non Perizinan, Laporan Hasil Kegiatan	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bidang Kebijakan
2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Investasi Daerah dan Daya Serap tenaga kerja (Misi III)	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	301 M	LKPM, Data Perizinan dan Non Perizinan Laporan Hasil Kegiatan	Bidang Pengendalian, Bidang Perencanaan, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Selama pelaksanaan tahun anggaran 2023, kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh hasil capaian yang sesuai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diterima untuk beberapa jenis layanan perizinan yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan reponden IKM Perempuan sebanyak 396 dan Laki-laki sebanyak 142 dari jumlah total 538 reponden maka dapat dilakukan perhitungan. Dimana dari hasil perhitungan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 90,14. Dengan angka Indeks sebesar 90,14, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **A** dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena Nilai A berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31-100 adalah Kategori Sangat Baik. Berdasarkan tingkat pendidikan dari responden tahun 2023. sebanyak 21 Orang tingkat pendidikan SMP, 57 Orang tingkat pendidikan SMA, 262 Orang tingkat pendidikan D3, 119 Orang tingkat pendidikan S1, 5 Orang tingkat pendidikan S2 dan 74

Orang tingkat pendidikan Profesi. Dari informasi tersebut diketahui bahwa dominan responden berpendidikan D3 dan S1.

Untuk capaian nilai realisasi investasi tahun 2023 sebesar 429,6 Milyar Rupiah, melebihi dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 301 Milyar Rupiah.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kami tampilkan pada tabel T-C 30.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat			A	A	A	A	A		A	A	
2	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat			301 M	370 M	440 M	509 M	429,6 M		153 M	122 M	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis penanaman modal selama tahun 2023 menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan pelaku ekonomi. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. **Target Investasi** : Pemerintah Indonesia menargetkan investasi sebesar Rp1.400 triliun pada tahun 2023. Target ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di atas angka lima persen.
2. **Krisis Ekonomi Global**: Meskipun ekonomi Indonesia dalam kondisi baik, tantangan global seperti **pandemi COVID-19**, ketegangan geo-politik, dan krisis pangan dan energi dapat mempengaruhi angka investasi. Oleh karena itu, stabilitas menjadi syarat utama untuk mencapai target tersebut.
3. **Strategi Fokus**: Salah satu strategi yang dilakukan adalah **hilirisasi**. Dengan memperkuat sektor hilir, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing di pasar global.

4. **Optimisme Realistis:** Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kita harus optimis, tetapi dengan realisme. Stabilitas dan strategi yang tepat akan memainkan peran kunci dalam mencapai target investasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal renja perangkat daerah, jumlah program yang diusulkan sebanyak 6 program, 13 Kegiatan, dan 33 sub kegiatan. Selanjutnya untuk pada tahapan rancangan rencana kerja ini terdapat 2 sub kegiatan yang tidak akan dilaksanakan yaitu sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Untuk sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak dilaksanakan karena sub kegiatan ini sepenuhnya akan terpusat dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak dilaksanakan karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menempati lantai 1 dan lantai 2 gedung Mal Pelayanan Publik, dimana untuk jasa terkait Listrik, air, dan Jasa Komunikasi disediakan oleh BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terdapat kebutuhan anggaran untuk penyusunan kajian potensi daerah dan pembuatan video potensi daerah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Ranwal				Analisa Hasil Kebutuhan		Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100 %	14.060.000	100 %	12.830.000	
		Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan					

No	Ranwal				Analisa Hasil Kebutuhan		Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)
		Terpadu Satu Pintu					
1	perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	100 %	165.000	100 %	50.000	
1	penyusunan dokumen perencanaan dan perangkat daerah	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	16 Dokumen	165.000	16 Dokumen	50.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.200.000	12 Bulan	5.120.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/Bulan	4.900.000	30 Org/Bulan	4.900.000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	300.000	12 Dokumen	220.000	
3	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	150 Paket	200.000	150 Paket	200.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	150 Paket	100.000	150 Paket	200.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya SDM Aparatur	35 Org	100.000	0 Org	-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	4.550.000	100 %	2.650.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket	240.000	20 Paket	50.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	55 Paket	2.000.000	55 Paket	300.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	400 Paket	65.000	400 Paket	100.000	

No	Ranwal				Analisa Hasil Kebutuhan		Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	500 Paket	125.000	500 Paket	150.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	80 Dokumen	120.000	80 Dokumen	50.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Rapat/ Konsultasi	500 Laporan	2.000.000	500 Laporan	2.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	90 Unit	2.000.000	155 Unit	2.200.000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	5 unit	1.000.000	5 unit	1.600.000	Kendaraan Roda 4 Mobil Pelayanan Keliling (1 unit), Kendaraan Roda 2 (4 unit)
3	Pengadaan Mabel	Jumlah Unit Pengadaan Meubelair Kantor	60 Unit	500.000	60 Unit	100.000	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	90 Unit	500.000	90 Unit	500.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	36 Bulan	1.135.000	24 Bulan	1.960.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	160.000	12 Laporan	160.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemakaian Telpn, Air dan Listrik	12 Laporan	325.000	0 Laporan	-	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Laporan	650.000	12 Laporan	1.800.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah	100 %	810.000	100 %	650.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan	6 Unit	200.000	6 Unit	100.000	

No	Ranwal				Analisa Hasil Kebutuhan		Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan Pembayaran Pajaknya					
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak nya	28 Unit	200.000	28 Unit	350.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	210.000	15 Unit	100.000	
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	200.000	1 Unit	100.000	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	2 Dok	340.000	5 Dok	210.000	
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Produk Hukum Daerah	1 Dok	140.000	5 Dok	60.000	
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dok	50.000			
2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3 Dok	90.000	5 Dok	60.000	
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peta Potensi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dok	200.000	1 Dok	150.000	
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman	Tersedianya Dokumen Revisi Rencana Umum	1 Dok	200.000	1 Dok	150.000	

No	Ranwal				Analisa Hasil Kebutuhan		Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)
	Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Penanaman Modal Daerah					
3	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	2 Dok	265.000	3 Dok	550.000	
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah	2 Dok	265.000	3 Dok	550.000	
1	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dok	75.000	1 Dok	300.000	
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data/ Informasi Strategi Promosi Penanaman Modal	2 Dok	190.000	2 Dok	250.000	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	2000 Izin	470.000	2000 Izin	1.010.000	
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	2000 Izin	470.000	2000 Izin	1.010.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dok	70.000	3 Dok	60.000	
2	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	2000  Pelaku Usaha	200.000	1500 Pelaku Usaha	250.000	

No	Ranwal				Analisa Hasil Kebutuhan		Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)
	Terintegrasi secara Elektronik	Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					
3	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12 Pelaku Usaha	100.000	6 Pelaku Usaha	150.000	
4	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	36 Kegiatan Usaha	100.000	500 Kegiatan Usaha	550.000	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Pengendalian pelaksanaan penanaman Penanaman Modal	440 M	58.500	440 M	425.000	
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	440 M	58.500	440 M	425.000	
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	24 Kegiatan Usaha	21.000	6 Kegiatan Usaha	25.000	
2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha	100 Pelaku Usaha	29.000	80 Pelaku Usaha	350.000	

No	Ranwal				Analisa Hasil Kebutuhan		Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)
		Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					
3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	8.500	12 Kegiatan Usaha	50.000	
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Dok	52.000	1 Dok	52.000	
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dok	52.000	1 Dok	52.000	
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dok	52.000	1 Dok	52.000	
	Jumlah			15.245.500		15.077.000	- 168.500

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah guna mengumpulkan usulan, saran dan masukan terhadap rancangan awal tahun anggaran 2025 yang telah disusun pada bulan Desember 2023 lalu. Acara menghadirkan para stakeholder terkait yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan.



Adapun usulan – usulan yang disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah tersebut kami tuangkan dalam table T-C 32. Berita Acara Forum Perangkat Daerah terlampir.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dari Kepala Bappeda menyarankan Dinas PMPTSP untuk menyusun IPRO untuk meningkatkan nilai jual Kabupaten sehingga menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	
	Untuk meningkatkan promosi melalui media daring (online);		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pada saat Dinas PMPTSP mengikuti kegiatan pameran disarankan untuk mengikuti Bisnis Meeting dan Bisnis Matching;		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	
	Dinas PMPTSP bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk menyiapkan bahan terkait mengikuti Carbon Trading;		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	
1	Dari BKAD menyarankan untuk fokus pada rincian kegiatan rutin, supaya tidak ada rincian yang tertinggal		Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	
2	Usulan dari Kepala DPMPTSP untuk pemeliharaan kantor untuk penyesuaian gerai bagi instansi yang bergabung Mal Pelayanan Publik dengan besaran anggaran 40 juta rupiah		Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	40.000.000
	Di usulkan belanja modal kendaraan dinas, Kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional pelayanan perizinan, dan dimasukkan kedalam RKBMD pada perubahan APBDP 2024		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	1 Unit	Kendaraan Dinas Pelayanan Keliling
3	Dari Dinas Lingkungan Hidup, disampaikan bahwa, pada tahun ini (2024), Dinas Lingkungan Hidup sedang menyusun KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD, diminta kepada OPD terkait untuk berperanaktif menyampaikan masukan dan saran, sehingga rencana rencana yang ada di OPD dapat masuk kedalam dokumen KLHS yang sedang disusun				
4	Dari Dinas Kesehatan, mohon dukungan visit lapangan terhadap pengecekan lapangan dalam verifikasi izin		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	12 Kegiatan Usaha	
5	Usulan dari Sekretaris DPMPTSP kepada Dinas PUPR untuk Pembangunan Gudang arsip MPP	Dinas PUPR		1 Unit	
6	Usulan dari Sekretaris DPMPTSP Kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penyediaan tempat sampah dan pengangkutannya			90 Unit	
7	Usulan dari sekretaris DPMPTSP untuk peningkatan Sarana dan Prasarana DPMPTSP sebagaimana surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 000.5.3.4/756/SJ tanggal 12 Februari 2024 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah		Terpenuhinya peralatan gedung kantor		
8	Usulan dari Pejabat Fungsional Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan		Meningkatnya SDM Aparatur	24 Orang	
9	Saran dari Kepala Bappeda untuk membentuk Tim Pelayanan Investasi		Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	1 Kegiatan	

Bab III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional penanaman modal untuk tahun 2024 memiliki beberapa arah strategis yang bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut adalah poin-poin penting:

1. **Perbaikan Iklim Penanaman Modal** : Pemerintah fokus pada perbaikan iklim investasi agar lebih ramah bagi para investor. Ini mencakup **deregulasi, peningkatan layanan, dan pengurangan birokrasi**.
2. **Persebaran Penanaman Modal**: Upaya akan dilakukan untuk mengalihkan investasi ke daerah di luar Jawa. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat merata dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
3. **Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi** : Investasi akan difokuskan pada sektor pangan, infrastruktur, dan energi. Pembangunan infrastruktur yang kuat akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
4. **Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)** : Pemerintah mendorong investasi yang ramah lingkungan, termasuk dalam sektor energi terbarukan dan pengelolaan limbah.
5. **Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)**: Kebijakan akan mendukung UMKMK agar dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional.
6. **Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal** : Pemerintah akan memberikan fasilitas dan insentif bagi investor untuk mendorong investasi.
7. **Promosi Penanaman Modal** : Upaya promosi akan ditingkatkan untuk menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Proyeksi untuk tahun 2025 juga optimis. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai kisaran 5,3-5,6%, dan inflasi tetap terkendali di bawah 2,80%.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, maka

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 yaitu :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	A
2	Meningkatkan Perekonomian Kabupaten	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	440 Milyar Rupiah

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 ssebanyak 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1) Kegiatan : Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah

2) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Direncanakan pengadaan komputer desktop untuk staf kantor sebanyak 10 unit, dan Laptop 5 unit karena komputer yang ada sudah tidak lagi kompetibel dengan aplikasi yang umum digunakan pada saat ini.

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pada tahun 2025, DPMPTSP merencanakan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 untuk pelayanan keliling 1 (satu) unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit.

- Pengadaan Mebel

6) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1) Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

2) Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

1) Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

1) Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1) *Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota*

Sub Kegiatan :

- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1) *Kegiatan : pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*

Sub Kegiatan :

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel TC. 33 berikut :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (dalam ribuan)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		100 %	12.830.00		100 %	15.055.000
		Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
X.XX.01.2.01	perencanaan, Penguasaan, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja		100 %	165.000		100 %	170.000
X.XX.01.2.01.0001	penyusunan dokumen perencanaan dan perangkat daerah	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	Kab. Tanjung Jabung Barat	16 Dokumen	50.000		18 Dokumen	170.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	5.120.000		12 Bulan	5.500.000
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanjung Jabung Barat	30 Org/Bulan	4.900.000		30 Org/Bulan	5.200.000
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Dokumen	220.000		12 Dokumen	300.000
X.XX.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik		150 Paket	200.000		150 Paket	200.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (dalam ribuan)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Tanjung Jabung Barat	150 Paket	200.000		150 Paket	100.000
X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya SDM Aparatur	Kab. Tanjung Jabung Barat	0 Org	-		35 Org	100.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah		100 %	2.650.000		100 %	5.075.000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat	20 Paket	50.000		25 Paket	250.000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Tanjung Jabung Barat	55 Paket	300.000		60 Paket	2.000.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	Kab. Tanjung Jabung Barat	400 Paket	100.000		450 Paket	70.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedinya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanjung Jabung Barat	500 Paket	150.000		70.000 Paket	130.000
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	80 Dokumen	50.000		85 Dokumen	125.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedinya Biaya Rapat/ Konsultasi	Kab. Tanjung Jabung Barat	500 Laporan	2.000.000		500 Laporan	2.500.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya peralatan gedung kantor		90 Unit	2.200.000		155 Unit	2.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (dalam ribuan)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	90 Unit	1.600.000	Roda 4	5 Unit	1.000.000
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mabel	Jumlah Unit Pengadaan Meubelair Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat	5 unit	100.000		60 unit	500.000
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat	60 Unit	500.000		90 Unit	500.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor		36 Bulan	1.960.000		36 Bulan	1.230.000
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Laporan	160.000		12 Laporan	180.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemakaian Telpn, Air dan Listrik	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Laporan	-		12 Laporan	350.000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Laporan	1.800.000		12 Laporan	700.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah		100 %	650.000		100 %	880.000
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	Kab. Tanjung Jabung Barat	6 Unit	100.000		6 Unit	200.000
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajaknya	Kab. Tanjung Jabung Barat	28 Unit	350.000		28 Unit	200.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (dalam ribuan)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanjung Jabung Barat	15 Unit	100.000		20 Unit	230.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Unit	100.000		1 Kali	250.000
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten		5 Dok	210.000		5 Dokumen	90.000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Produk Hukum Daerah		5 Dok	60.000		5 Dokumen	90.000
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Tanjung Jabung Barat	- Dok	-		- Dokumen	-
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat	5 Dok	60.000		5 Dok	90.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peta Potensi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat		1 Dok	150.000		- Dokumen	-
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dok	150.000		- Dokumen	-
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor		3 Dok	550.000		3 Dokumen	275.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (dalam ribuan)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah		3 Dok	550.000		3 Dokumen	275.000
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dok	250.000		2 Dok	195.000
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		2 Dok	300.000		1 Dokumen	80.000
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal		2000 Izin	1.010.000		2.000 Izin	485.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu		2000 Izin	1.010.000		2.000 Izin	485.000
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	500 Kegiatan Usaha	60.000		4 Kegiatan Usaha	85.000
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tanjung Jabung Barat	1500 Pelaku Usaha	250.000		2000 Pelaku Usaha	200.000
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tanjung Jabung Barat	6 Pelaku Usaha	150.000		12 Pelaku Usaha	100.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (dalam ribuan)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Tanjung Jabung Barat	3 Dok	550.000		36 Dok	100.000
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal		440 M	425.000		509 M	69.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal		440 M	425.000		509 M	69.000
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Tanjung Jabung Barat	6 Kegiatan Usaha	25.000		24 Kegiatan Usaha	23.000
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Tanjung Jabung Barat	80 Pelaku Usaha	350.000		100 Pelaku Usaha	35.000
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Kegiatan Usaha	50.000		20 Kegiatan Usaha	11.000
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		1 Dok	52.000		1 Dok	68.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (dalam ribuan)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik		1 Dok	52.000		1 Dok	68.000
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dok	52.000		1 Dok	68.000
	Jumlah				15.077.000			16.042.000

Bab IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2025 sesuai dengan Renstra yang sudah ada, target Indikator Utama (IKU) adalah Nilai A untuk pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan Masyarakat dan 440 Milyar Rupiah untuk Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun sumber pendanaan pada tahun 2025 berasal dari dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sumber pendanaan lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Namun untuk saat ini alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik belum diketahui jumlahnya.

Tabel 4.1
Daftar Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Tahun	2021	2022	2023	2024
Jumlah Anggaran	326.122.000	350.736.000	406.900.000	586.411.000

Bab V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Dari Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Target IKU Tahun 2023 untuk Nilai IKM telah tercapai;
2. Target IKU Tahun 2023 untuk Nilai Investasi telah tercapai;
3. Target IKU Tahun 2024 (tahun berjalan) untuk Nilai IKM adalah A;
4. Target IKU Tahun 2024 (tahun berjalan) untuk Nilai Investasi adalah 370 Milyar Rupiah;
5. Target IKU Tahun 2025 untuk Nilai IKM adalah A;
6. Target IKU Tahun 2025 untuk Nilai Investasi adalah 440 Milyar Rupiah;
7. Pada Tahun 2025, Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 6 Program, 12 Kegiatan dan 31 Subkegiatan;

Pagu total untuk Rancangan Renja Tahun 2025 adalah Rp 15.077.000,- telah berkurang dari pagu Rancangan Awal yang sebelumnya sebesar Rp. 15.245.500.000,-.

5.2 Saran

Terkait penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Proyeksi pada tabel Tahun 2025 diperkirakan Nilai Investasi akan menurun menjadi 153 Milyar Rupiah sedangkan Target Renstra pada tahun 2025, Nilai investasi ditargetkan 440 Milyar Rupiah. Penetapan target 2025 perlu mendapat perhatian dan pertimbangan yang lebih matang.

Lampiran

Berita Acara Forum Perangkat Daerah

BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor : 000.7/ 31 / PMPTSP/2024

Pada hari ini Jumat tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing – masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil Keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 16 Februari 2024

Jam : 08.30 s.d. selesai

Tempat : Gedung Mal Pelayanan Publik Lt. 5

Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

MENYEPAKATI

KESATU : Menyetujui program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah;

KEDUA : Menyetujui rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN II berita acara ini;

KETIGA : Menyetujui daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

KEEMPAT : Menyetujui berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini; dan

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Kuala Tungkal, 16 Februari 2024.

BAPPEDA



Yeni Gustina, SE, MM

Pimpinan Sidang



M. Haviz, SE

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Tanjung Jabung Barat

No	Nama	Instansi	Alamat/ No. Telp. / HP	Tanda Tangan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman

KUALA TUNGKAL

Kode Pos 36557 Website : dpmptsp.tanjabbarkab.go.id

FORUM PERANGKAT DAERAH

DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TEMPAT

: Ruang Rapat Aula DPMPTSP Kab. Tanjab
Barat Lantai 5 MPP Kuala Tungkal

HARI / TANGGAL

: Jumat, 16 Februari 2024

PUKUL

: s.d Selesai

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	M. Hariz, SE	Kadis	1
2	Rita Morawati	Sekretaris	2 Rita
3	Hendry Fonda	Wakil	3
4	A. Husaini	Komis PM	4
5	Andrizal	Analisis Kebijakan	5
6	Suhani	Kabid Perizinan Non Perizinan	6
7	Abdul Cali	PLH DL	7
8	Katamsa	Ka. Bayanada	8
9	Muhammad Kipai	Direktur	9
10	Yeni Gusni	Duplikat	10
11	Rita Herawati	Duplikat	11
12	Esy Appyani, SE	Duplikat	12
13	Tuni Padyaningrum	Direktur	13
14	Gerry	Direktur Info	14
15	Nopriyanto	AKPD	15
16	Sugiharto	DRUPK	16
17	Agus Ma Puteh	DPK PTV	17
18	Agus HD	1	18
19			19
20	Salmah	DPMPTSP	20
21			21
22			22
23	DERI PUTRA RELANDIA	DPMPTSP	23
24	Nurbayana	DPMP TSP	24
25	M. KARTIAN ARFA 2m	DPMPTSP	25
26	Yogi Permana	DPMPTSP	26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan Penting
			2025	2026	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(8)	(6)	(9)	(7)
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100 %	100 %	14.060.000.000	15.055.000.000	
X.XX.01.2.01	perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	100 %	100 %	165.000.000	170.000.000	
X.XX.01.2.01.0001	penyusunan dokumen perencanaan dan perangkat daerah	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	16 Dokumen	18 Dokumen	165.000.000	170.000.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	5.200.000.000	5.500.000.000	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/Bulan	30 Org/Bulan	4.900.000.000	5.200.000.000	
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000	300.000.000	
X.XX.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	150 Paket	150 Paket	200.000.000	200.000.000	
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakai Dinas Berserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakai Dinas Berserta Perlengkapannya	150 Paket	150 Paket	100.000.000	100.000.000	
X.XX.01.2.05.0009	Pedidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya SDM Aparatur	35 Org	35 Org	100.000.000	100.000.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.550.000.000	5.075.000.000	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket	25 Paket	240.000.000	250.000.000	
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	55 Paket	60 Paket	2.000.000.000	2.000.000.000	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	400 Paket	450 Paket	65.000.000	70.000.000	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	65.000 Paket	70.000 Paket	125.000.000	130.000.000	
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	80 Dokumen	85 Dokumen	120.000.000	125.000.000	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Rapat/ Konsultasi	500 Laporan	500 Laporan	2.000.000.000	2.500.000.000	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	90 Unit	155 Unit	2.000.000.000	2.000.000.000	
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	5 unit	5 unit	1.000.000.000	1.000.000.000	
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Meubelair Kantor	60 unit	60 unit	500.000.000	500.000.000	
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	90 Unit	90 Unit	500.000.000	500.000.000	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.135.000.000	1.230.000.000	
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	160.000.000	180.000.000	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemakaian Telpn, Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	325.000.000	350.000.000	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	650.000.000	700.000.000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	810.000.000	880.000.000	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	6 Unit	6 Unit	200.000.000	200.000.000	
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajaknya	28 Unit	28 Unit	200.000.000	200.000.000	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	20 Unit	210.000.000	230.000.000	
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Kali	200.000.000	250.000.000	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	6 Dokumen	5 Dokumen	290.000.000	90.000.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Produk Hukum Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	90.000.000	90.000.000	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	- Dokumen	- Dokumen	-	-	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	90.000.000	90.000.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peta Potensi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	- Dokumen	200.000.000	-	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	- Dokumen	200.000.000	-	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	3 Dokumen	3 Dokumen	265.000.000	275.000.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercaainya Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	265.000.000	275.000.000	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	190.000.000	195.000.000	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	80.000.000	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	2.000 Izin	2.000 Izin	470.000.000	485.000.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercaainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	2.000 Izin	2.000 Izin	470.000.000	485.000.000	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000	85.000.000	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	200.000.000	200.000.000	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	100.000.000	100.000.000	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	36 Kegiatan Usaha	36 Kegiatan Usaha	100.000.000	100.000.000	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	440 M	509 M	58.500.000	69.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana		Catatan Penting
			2025	2026	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(8)	(6)	(9)	(7)
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	440 M	509 M	58.500.000	69.000.000	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	24 Kegiatan Usaha	24 Kegiatan Usaha	21.000.000	23.000.000	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	29.000.000	35.000.000	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	8.500.000	11.000.000	
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000	68.000.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000	68.000.000	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000	68.000.000	
Jumlah					15.195.500.000	16.042.000.000	

Pimpinan Sidang

M. HAVIZ, SE